



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 5507-5513

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Evaluasi Kebijakan Mudik Kebangsaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Tahun 2024

Supriansyah<sup>1✉</sup>, Adianto<sup>2</sup>, Hasim As'ari<sup>3</sup>

Universitas Riau

Email: [supriansyah2990@gmail.com](mailto:supriansyah2990@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penurunan tingkat partisipasi peserta terhadap adanya program mudik kebangsaan gratis kepolisian negara republik indonesia daerah riau. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pihak kepolisian untuk mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. Tujuan dilakukannya evaluasi dalam program ini untuk mendorong penyempurnaan terhadap program yang telah berjalan selama tiga tahun terakhir. Agar program ini dapat terus berjalan atau berkelanjutan, dalam pelaksanaan program mudik kebangsaan ini mengalami kendala-kendala dalam implementasinya. Namun dalam perkembangannya upaya demi upaya terus dilakukan agar program ini dapat berjalan atau berkelanjutan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan program mudik kebangsaan gratis kepolisian negara republik indonesia daerah riau serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi pada penerapan program mudik kebangsaan gratis kepolisian negara republik indonesia daerah riau, penelitian ini menggunakan teori William M Dunn evaluasi kebijakan efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas dan ketepatan. Metode penelitian ini kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kegiatan program mudik kebangsaan gratis kepolisian negara republik indonesia daerah riau telah berhasil terlaksana selama tiga tahun dan dinikmati oleh masyarakat luas. Namun dilapangan menunjukan bahwa masih terdapat tingkat penurunan peserta dari tahun pertama kegiatan program ini dilaksanakan, dibutuhkan penyebaran informasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar tingkat partisipasi meningkat serta perbaikan dari segi sumberdaya.

Kata Kunci: *Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan Program, Mudik Kebangsaan*

### Abstract

This research is motivated by the decline in participant engagement in the free national homecoming program organized by the Regional Police of Riau, Indonesia. This condition poses a challenge for the police to evaluate the implemented program. The purpose of this evaluation is to encourage improvements to the program that has been running for the past three years. To ensure the program's sustainability, it faces several implementation challenges. However, continuous efforts are being made to ensure the program can run or be sustained optimally. This research aims to observe the implementation of the free national homecoming policy by the Regional Police of Riau, Indonesia, and to identify the obstacles faced in its application. This research uses William M. Dunn's policy evaluation theory, which includes effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The research method is qualitative, with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of this research indicate that the free national homecoming program by the Regional Police of Riau, Indonesia, has been successfully implemented for three years and enjoyed by the public. However, in the field, it shows a decline in participant numbers since the first year of the program's implementation. There is a need for extensive dissemination of information to the public to increase participation rates, as well as improvements in resources.

*Keywords: Policy Evaluation, Program Implementation, National Homecome*

### PENDAHULUAN

Di tengah tradisi mudik Lebaran yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia, masalah-masalah seperti kelangkaan bahan bakar, polusi udara, kemacetan lalu lintas, dan tingginya angka kecelakaan menjadi perhatian serius setiap tahunnya. Untuk mengatasi tantangan ini, Kapolda Riau memperkenalkan program mudik gratis sebagai langkah inovatif dalam menanggapi kebutuhan mendesak masyarakat saat momen penting seperti Lebaran.

Program ini tidak sekadar menyediakan transportasi gratis bagi masyarakat yang ingin pulang kampung, tetapi juga bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi mereka yang mungkin tidak mampu membiayai perjalanan sendiri. Dengan demikian, program ini memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi mereka yang biasanya terbatas oleh keterbatasan ekonomi untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga di kampung halaman.

Selain manfaat sosialnya, program mudik gratis juga diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah infrastruktur dan lingkungan yang kerap terjadi selama musim mudik.

Dengan mengalihkan sebagian besar perjalanan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang disediakan, program ini berpotensi mengurangi kemacetan yang parah di jalan raya serta mengurangi tingkat polusi udara yang biasanya meningkat tajam akibat volume kendaraan yang tinggi. Namun, seperti halnya dengan setiap kebijakan publik, keberhasilan program mudik gratis tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang terlibat, tetapi juga dari dampaknya terhadap mobilitas sosial, keamanan lalu lintas, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Evaluasi yang teliti terhadap implementasi dan hasil dari program ini akan menjadi kunci untuk mengevaluasi apakah langkah ini berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, serta bagaimana efektivitasnya dapat ditingkatkan di masa mendatang. Anderson dalam Winarno (2008) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai penilaian terhadap substansi, implementasi, dan dampak kebijakan. Lester dan Stewart (Winarno, 2008) membagi evaluasi kebijakan menjadi dua tugas: menentukan konsekuensi kebijakan dengan menggambarkan dampaknya, dan menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi juga bertujuan menilai dampak kebijakan, baik positif maupun negatif, mengidentifikasi penyimpangan dengan membandingkan tujuan dan pencapaian, serta menyediakan masukan untuk kebijakan mendatang (Subarsono, 2005). Menurut Dunn dalam Leo Agustino (2003: 608), evaluasi kebijakan memiliki beberapa sifat penting. Pertama, evaluasi berfokus pada nilai, berbeda dengan pemantauan yang hanya mengumpulkan informasi. Kedua, evaluasi memerlukan interdependensi antara fakta dan nilai, di mana kinerja kebijakan harus didukung oleh bukti bahwa hasilnya adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu, sehingga pemantauan menjadi prasyarat evaluasi. Ketiga, evaluasi berorientasi pada masa kini dan masa lampau, menilai hasil yang ada saat ini dan sebelumnya, berbeda dengan rekomendasi yang bersifat prospektif dan dibuat sebelum tindakan diambil. Keempat, nilai-nilai dalam evaluasi memiliki kualitas ganda, berfungsi sebagai tujuan dan cara. Misalnya, kesehatan dapat dianggap sebagai nilai intrinsik (diperlukan bagi dirinya sendiri) atau ekstrinsik (diperlukan untuk mencapai tujuan lain). Nilai-nilai ini sering disusun dalam hierarki yang mencerminkan kepentingan dan saling ketergantungan antara tujuan dan sasaran.

Menurut Maghfira (2020), evaluasi kebijakan mencakup seluruh siklus kebijakan, mulai dari pembentukan konsep hingga implementasi. Menurut Lestar (2019:19), evaluasi

program adalah proses untuk menentukan apakah program dapat dilaksanakan dengan efektif berdasarkan evaluasi komponen-komponennya menggunakan informasi dari evaluator. Dalam konteks ini, artikel ini akan mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana program mudik gratis Kapolda Riau diimplementasikan, mengevaluasi keberhasilannya, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang masih perlu diatasi untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan dalam mendukung kebutuhan masyarakat selama musim mudik Lebaran.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendalami dan menganalisis pelaksanaan Program Mudik Kebangsaan Kepolisian Daerah Riau tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang mendetail dan mendalam mengenai kondisi serta situasi yang terjadi di lapangan berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian difokuskan pada evaluasi kebijakan program tersebut dengan membatasi ruang lingkup agar data yang diperoleh relevan dan terfokus. Penelitian dilakukan di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau, dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan implementasi program dan ketersediaan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam dengan informan seperti pejabat terkait dan peserta program, observasi langsung di lapangan, serta pengumpulan dokumen dari sumber resmi dan media online terkait. Analisis data dilakukan dengan mengolah, memilah, dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk menghasilkan narasi kualitatif yang mampu menjelaskan evaluasi kebijakan dengan baik. Hasil analisis ini diinterpretasikan dengan mendalam menggunakan teori yang relevan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi dan dampak Program Mudik Kebangsaan Kepolisian Daerah Riau tahun 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pelaksanaan Mudik Kebangsaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Daerah Riau tahun 2024 telah menghasilkan berbagai dampak positif dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam upaya memastikan keberhasilannya. Evaluasi ini mempertimbangkan beberapa dimensi penting seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Dalam hal efektivitas, kebijakan ini terbukti berhasil dalam menjaga keamanan dan keselamatan selama periode mudik. Hasil wawancara dengan beberapa petugas kepolisian menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberikan pengawasan dan pelayanan yang maksimal kepada seluruh peserta mudik, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka. Bapak AKBP Dasril,SPD,M.M selaku kabag Bin Oprasional menyatakan, "Tentu kami menilai pelaksanaan ini tepat, apalagi kalau melihat antusias masyarakat cukup baik sampai tahun ke tiga program ini terlaksana." Hal ini mencerminkan pengakuan akan keberhasilan program dalam memenuhi tujuan utamanya untuk menjaga keamanan dan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.

Meskipun demikian, evaluasi juga mengidentifikasi beberapa kendala yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efisiensi kebijakan ini. Salah satunya adalah terbatasnya kuota pendaftaran yang seringkali cepat penuh, seperti yang disampaikan oleh saudara Firdaus, peserta mudik kebangsaan, "Program ini sangat tepat bagi kami sekeluarga, saya ikut jadi peserta mudik kebangsaan bersama istri dan kedua anak saya, tetapi kadang-kadang terkendala dengan jadwal liburan yang tidak menentu." Kendala ini menyoroti perlunya peningkatan dalam manajemen informasi dan pengelolaan kuota agar dapat lebih merata dan inklusif.

Prinsip perataan dalam kebijakan ini sangat ditekankan untuk memastikan distribusi manfaat dan perlakuan yang adil di antara semua peserta. Program ini sukses dalam memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta, seperti yang diungkapkan oleh saudara M. Ramli Ali, peserta mudik kebangsaan, "Iya, sepertinya layanan informasinya saja yang perlu diperbaiki agar para masyarakat dapat informasi secara menyeluruh sehingga jangkauan lebih luas atau batas pendaftarannya mungkin yang lebih lama."

Tanggapan positif dari masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan menunjukkan tingkat responsivitas yang baik dari pihak kepolisian dalam merespons masukan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat. Hal ini terbukti dari pernyataan Bapak Kopol Yohanrs Basri, S.PI, "Upaya menjaga keselamatan bagi setiap masyarakat menjadi perhatian utama bagi kami, jika memang terjadi human error dalam pelaksanaan tentu personil kami selalu siaga." Respons dari peserta mudik menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan solusi yang tepat dalam merencanakan perjalanan mudik yang aman dan terencana.

Secara keseluruhan, evaluasi ini mengonfirmasi bahwa pelaksanaan Mudik Kebangsaan 2024 telah berhasil mencapai tujuan utama kebijakan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Evaluasi ini memberikan dasar yang kuat untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan implementasi kebijakan di masa depan, dengan mempertimbangkan masukan dan pengalaman dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berhasil dalam menjaga keamanan selama periode mudik, tetapi juga memberikan landasan yang solid untuk pembaharuan dan peningkatan layanan di masa depan.

### SIMPULAN

Kebijakan Mudik Kebangsaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Daerah Riau tahun 2024 terbukti efektif dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk pulang ke kampung halaman. Program ini juga telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan baik, menjadikannya efisien dalam pengelolaan operasional. Selain itu, kebijakan ini cukup mampu menjangkau banyak orang dan memberikan layanan yang diperlukan selama periode mudik. Dalam hal pemerataan, kebijakan ini memberikan kesempatan akses transportasi yang adil bagi masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi, mengurangi disparitas dalam aksesibilitas. Responsivitas program terhadap kebutuhan masyarakat selama periode mudik juga sangat baik, dengan menawarkan alternatif transportasi umum yang terjangkau. Secara keseluruhan, evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan Mudik Kebangsaan 2024 tepat dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, seperti meningkatkan keselamatan perjalanan dan mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat. Evaluasi yang terus menerus perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan program ini serta untuk mengatasi potensi tantangan di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mukrimaa, S. Harmianto, S. (2016). evaluasi program dan monitoring. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).
- Rahman, A. A., & Nasryah, C. E. (2019). Evaluasi Pembelajaran. In *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Robert, B., & Brown, E. B. (2004). *teori evaluasi program* (Issue 1).
- Suaib, M. R. (2015). *Pengantar Kebijakan Publik Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Calpulis.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (2nd ed.)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maghfira, E. R. (2020). *Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Elektronik Melalui Kartu Kombo Di Kabupaten Bataeng*.  
[https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12807-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12807-Full_Text.pdf)
- Mayarni, M., & Meiwanda, G. (2019). Peningkatan Ekonomi Rakyat Berbasis Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 111. <https://doi.org/10.31258/jkp.9.2.p.111-116>